



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Nur Indah Pratiwi Lihawa^a, Sahmin Noholo^b, Amir Lukum^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: nurindahpratiwilihawa@gmail.com^a, sahmin.noholo@ung.ac.id^b,
amirlukum@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 16-01-2025

Revised 27-01-2025

Accepted 27-01-2025

Kata Kunci:

Transparansi,
Partisipasi Masyarakat,
Akuntabilitas
Pengelolaan Dana
Desa.

Keywords:

Transparency,
Community
Participation,
Accountability for Village
Fund Management.

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 111 responden. Analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2) partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan 3) transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berimplikasi pada penguatan transparansi dan pelibatan masyarakat oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

A B S T R A C T

The aim of this research is to determine the influence of transparency and community participation on the accountability of village fund management in Boliyohuto District Gorontalo Regency. This research method is a descriptive quantitative method. The sampling technique uses purposive sampling technique. This research used primary data by distributing questionnaires to 111 respondents. The data analysis used is multiple linear regression analysis. The results of the research show that 1) transparency has a positive and significant effect on the accountability of village fund management, 2) community participation has a positive and significant effect on the accountability of village fund management, and 3) transparency and community participation simultaneously have a significant effect on the accountability of village fund management. The results of this study have implications for strengthening transparency and community involvement by village governments in managing village finances.

@2025 Nur Indah Pratiwi Lihawa, Sahmin Noholo, Amir Lukum
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk memaksimalkan program pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia, khususnya di pedesaan yang menjadi fokus pemerintahan. Kerja sama dan keterlibatan kepala desa dengan penduduk setempat sangat penting untuk pencapaian pembangunan di setiap desa. Oleh karena itu, perangkat desa dan masyarakat harus saling mendukung, dengan pemerintah daerah yang bertindak sebagai katalisator keterlibatan dan masyarakat sebagai peserta aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa (Mualifu et al., 2019).

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang adanya alokasi dana desa yang semestinya menjadikan pengelolaan keuangan desa semakin transparan dan akuntabel. Dana desa adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan desa, pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan program atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Untuk pemberian dana desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa (Fajri & Julita, 2021).

Pemberian dana desa memberikan dampak positif bagi pembangunan desa diberbagai bidang seperti meningkatkan infrastruktur desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, dan juga memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat desa. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada public (Mardiasmo, 2018:32). Transparansi dan partisipasi masyarakat dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dimana keterbukaan informasi dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat tentang suatu hal seperti kebijakan, program, dan anggaran sehingga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring suatu program atau kegiatan sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, transparansi yakni keterbukaan informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun Partisipasi masyarakat yakni merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat didalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin

tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang diperoleh oleh peneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto yaitu beberapa desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto pelaporan keuangannya masih kurang transparan. Menurut PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) di Kecamatan Boliyohuto setiap desa telah disediakan papan informasi untuk mengetahui berapa dana desa yang telah diterima oleh desa tersebut dan untuk perencanaan pembangunan yang akan dilakukan hanya disampaikan secara lisan melalui musyawarah desa saja. Namun yang menjadi kendalanya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah, BPD, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilakukan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto belum terlaksana dengan baik. Seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan yang belum terlaksana sampai saat ini.

Berdasarkan pada kajian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jansen dan Meckling (1979) menjelaskan bahwa teori keagenan pada dasarnya muncul akibat adanya kontrak atau konflik antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberikan amanat kepada agen berupa beberapa fungsi pertumbuhan perusahaan kedepannya. Keterkaitan *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dari sisi pelaporan keuangan pemerintah desa yang secara khusus, dimana dalam hal ini aparat desa bertindak sebagai pihak *agent* yang memiliki amanah atau kepercayaan dalam mengelola tatanan desa dan berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk informasi yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh pihak *principal* (pemilik) yaitu masyarakat. Berkaitan dengan pendelegasian tugas dari masyarakat kepada pemerintah desa, maka diperlukan segala bentuk informasi terkait pengelolaan keuangan desa yang harus dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Marlon Reu & Lasdi, 2021).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kinerja aparat pemerintah desayang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran dan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Pengelolaan dana desa harus

dilakukan secara profesional, ketat dengan kontrol dan integritas (Merawati et al., 2022).

Transparansi

Menurut Sujarweni (2015), Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Sedangkan menurut Wida (2016) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan secara terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai keterlibatan masyarakat secara umum dalam proses pembangunan, dimana masyarakat dapat berperan dalam suatu proses pembangunan berkelanjutan. Menurut (Mentari Tumbel, 2019) Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat-masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal.

Rumusan Hipotesis

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2012:30), Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya keterbukaan tersebut, maka akuntabilitas dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sehingga dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dapat terserap dengan baik. Semakin tinggi tingkat transparan maka semakin baik pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.

Pengaruh Partisipasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, mulai

dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat didalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula. Semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel (Medianti, 2018). Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.

Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik untuk memberikan hak dan kesempatan untuk mengetahui informasi yang menyangkut pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat. Sehingga disusun hipotesis sebagai berikut: Hipotesis berikut dapat diturunkan dari informasi yang diberikan diatas:

H₃ : Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui apa saja yang berpengaruh terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintah Kecamatan Boliyohuto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian survey dengan mengambil sampel dari suatu populasi menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dalam penelitian ini terdapat variable bebas (Transparansi dan Partisipasi Masyarakat) dan variable terikat (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun dan BPD yang ada di Kecamatan Boliyohuto.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Sebelum data dianalisis untuk pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrument penelitian yaitu uji validitas dan reliabilitas data, serta dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

Definisi Oprasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada warga, ini berarti diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pemerintah atau eksekutif sebagai penentu kebijakan sekaligus sebagai eksekutor kebijakan terhadap warga masyarakat guna mengetahui sudah sejauh mana pihak pemerintah telah merealisasikan kebijakannya dalam upaya memenuhi harapan masyarakat (Fajri & Julita, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembuatan keputusan dibuat secara tertulis. 2. Akurasi dan kelengkapan informasi. 3. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. 	Ordinal
Transparansi (X ₁)	Menurut Sujarweni (2015) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu. 2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya. 3. Kemudahan akses informasi. 4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. 	Ordinal
Partisipasi Masyarakat (X ₂)	Partisipasi merupakan suatu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat-masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal (Mentari Tumbel, 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi untuk mengidentifikasi masalah. 2. Ikut dalam pengambilan keputusan. 3. Partisipasi untuk ikut dalam pelaksanaan program pembangunan. 4. Partisipasi dalam evaluasi. 	Ordinal

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2.

1. Variabel Transparansi (X1)

Jumlah dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi dalam penelitian ini sebanyak 11 pernyataan. Pengujian validitas pernyataan tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Transparansi (X1)

No	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	0,529	0,186	Valid
2	0,643	0,186	Valid
3	0,543	0,186	Valid
4	0,560	0,186	Valid
5	0,581	0,186	Valid
6	0,626	0,186	Valid
7	0,603	0,186	Valid
8	0,570	0,186	Valid
9	0,396	0,186	Valid
10	0,456	0,186	Valid
11	0,644	0,186	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, semua item pernyataan pada variabel Transparansi (X1) dinyatakan valid karena hasil uji r_{hitung} masing-masing pernyataan lebih besar dari r_{tabel} 0,186.

2. Variabel Partisipasi Masyarakat (X2)

Jumlah dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Partisipasi Masyarakat dalam penelitian ini sebanyak 9 pernyataan. Pengujian validitas pernyataan tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X2)

No	Rhitung	rtabel	Keterangan
1	0,591	0,186	Valid
2	0,717	0,186	Valid
3	0,742	0,186	Valid
4	0,740	0,186	Valid
5	0,673	0,186	Valid
6	0,729	0,186	Valid
7	0,758	0,186	Valid
8	0,636	0,186	Valid
9	0,651	0,186	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, semua item pernyataan pada variabel Partisipasi Masyarakat (X2) dinyatakan valid karena hasil uji r_{hitung} masing-masing pernyataan lebih besar dari r_{tabel} 0,186. Dengan demikian dapat dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

3. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Jumlah dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam penelitian ini sebanyak 8 pernyataan. Pengujian validitas pernyataan tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Rhitung	rtabel	Keterangan
1	0,572	0,186	Valid
2	0,771	0,186	Valid
3	0,749	0,186	Valid
4	0,801	0,186	Valid
5	0,709	0,186	Valid
6	0,742	0,186	Valid
7	0,504	0,186	Valid
8	0,602	0,186	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, semua item pernyataan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dinyatakan valid karena hasil uji rhitung masing-masing pernyataan lebih besar dari rtabel 0,186. Dengan demikian dapat dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Uji Realibilitas

Menurut Imam Ghozali (2012), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reabilitas merupakan uji yang digunakan untuk menentukan apakah suatu instrument dikatakan reliable atau tidak dengan menggunakan batasan *Cronbach Alpha* > 0,60. Hasil uji realibilitas untuk variabel – variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Rhitung	Nilai <i>CronbachAlpa</i>	Keterangan
Transparansi (X1)	0,778	0,60	Reliabel
Partispasi Masyarakat (X2)	0,863	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,834	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.11, dapat diketahui bahwa variabel Transparansi (X1), Partispasi Masyarakat (X2) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) diperoleh nilai reliabilitas lebih besar jika dibandingkan dengan nilai *Cronbach alpha* 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi (X1), Partispasi Masyarakat (X2), dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dapat dikatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

		UnstandardizedResidua
N		111
NormalParameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.78697581
MostExtremeDifferencesAbsolute		.078
Positive		.048
Negative		-.078
Kolmogorov-SmirnovZ		.078
Asymp.Sig.(2-tailed)		.095

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan uji normalitas dengan menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnovtest* sebagaimana tertera pada tabel 4.13, maka diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk *Unstandardized Residual* yaitu 0,095 lebih besar dari 0,05 ($0,095 > 0,05$) sehingga data dikatakan berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		CollinearityStatistics	
		Tolerance	VIF
1	Transparansi	.883	1.132
	Partisipasi Masyarakat	.883	1.132

Sumber: Data diolah, 2024

Dari hasil analisis pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel Transparansi (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) yaitu sebesar $0,883 \geq 0,10$ serta nilai VIF $1.132 < 10$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada masing-masing variabel independen.

Hasil Uji t

Uji t dengan melakukan pengurangan mengikuti variabel yang digunakan merupakan alat statistik yang berguna untuk menguji pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel tertentu (Ghozal, 2021).

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.608	3.171		.823	.413
Transparansi	.302	.069	.334	4.351	.000
Partisipasi Masyarakat	.426	.070	.468	6.101	.000

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kemudian partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 2,608 + 0,302 X_1 + 0,426 X_2 + e$$

Berdasarkan pada persamaan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta 2,608 adalah merupakan nilai dari akuntabilitas pengelolaan dana desa jika tidak dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya untuk nilai variabel transparansi sebesar 0,302 atau 30,2% dapat dijelaskan bahwa ketika transparansi mengalami kenaikan satu persen, maka akan mempengaruhi peningkatan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 30,2%. Kemudian untuk nilai variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,426 atau 42,6% dapat dijelaskan bahwa ketika partisipasi masyarakat mengalami kenaikan satu persen, maka akan mempengaruhi peningkatan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 42,6%.

Hasil Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui secara keseluruhan dalam penelitian ini Uji F (uji simultan) digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1227.947	2	613.974	42.034	.000 ^b
	Residual	1577.530	108	14.607		
	Total	2805.477	110			

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 9 Menunjukkan hasil uji F diperoleh sebesar 42.034 dengan nilai signifikannya sebesar 0.000 <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Analisis koefisien determinasi (*R Square*) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis koefisien determinasi antara lain:

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.662 ^a	.438	.427	3.82188

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan pada tabel 10 diatas angka *Adjusted R Square* menunjukkan koefisien determinasi atau peranan variance (variabel independen dalam hubungan dengan variabel dependen). Angka Adjusted R Square sebesar 427 atau 42,7% hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) mampu dijelaskan oleh variabel Transparansi (X1), Partisipasi Masyarakat (X2). Sementara sisanya 57,3% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto

Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Boliyohuto. Koefisien positif dan signifikan pada hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa diterima. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat. Sehingga dengan adanya transparansi dapat memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui informasi secara mudah tentang siklus keuangan desa (Putra & Rasmini, 2020).

Sehubungan dengan teori agensi, dimana pemerintah desa bertindak sebagai pihak *agent* yang memiliki amanah atau kepercayaan dalam mengelola tatanan desa dan berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk informasi yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh pihak *principal* yaitu masyarakat. Pemerintah melakukan tanggungjawab yang maksimal untuk masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sikap tanggung jawab dari pemerintah memberikan keyakinan dan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa (Marlon Reu & Lasdi, 2021). Hasil yang sama juga didapat dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Shintarani Intan Sundari et al., 2024), yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto

Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis kedua yaitu “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” diterima. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febria & Taufik, 2021) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan daerah atau secara umum berpartisipasi diartikan sebagai keikutsertaan aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan mengidentifikasi masalah yang ada didalamnya.

Sebagaimana dijelaskan pada teori agensi, pemerintah desa sebagai pihak agensi memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagai pihak prinsipal. Periansya dan Sopiyan (2020), juga menyatakan bahwa penerapan partisipasi masyarakat

berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa karena membutuhkan keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan keputusan dan penyelenggaraannya.

Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan variabel independen yaitu Transparansi (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto. Hal tersebut diperoleh dari hasil statistic yang telah dilakukan yakni memiliki nilai Fhitung lebih besar dibandingkan nilai Ftabel dan nilai signifikan yang dihasilkan lebih kecil dari nilai 0,05 maka H0 ditolak dan H3 diterima. Sebagaimana yang dijelaskan pada teori keagenan yang mendeskripsikan bahwa bertanggung jawab terkait pengelolaan dana desa yang dimulai dari perancangan sampai ketetapan hasil akhir menjadi tugas pemerintah desa sebagai *agent*. Pemerintah desa wajib menerapkan akuntabilitas yang dapat dipahami dengan mudah dan bersifat terbuka agar mudah dipahami, serta bersifat transparan dengan melibatkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam semua proses (Nugroho et al., 2022).

Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ilmiah et., al 2020). Oleh karena itu semakin baik transparansinya dalam hal pengelolaan keuangan dana desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu Abdul Latif (2021) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan, dengan adanya transparansi memudahkan pengawasan sosial dari masyarakat agar kebijakan yang dijalankan pemerintah berhasil.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Boliyohuto.
2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan boliyohuto.
3. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Boliyohuto.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat. Kedua, dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari kuesioner

yang didasarkan pada persepsi responden. Sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, Diharapkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi di Kecamatan Boliyohuto. Penggunaan website dan media sosial menunjukkan bahwa pemerintah desa mengikuti perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk terlibat dalam proses mengidentifikasi masalah yang merupakan langkah positif menuju pembangunan masyarakat yang lebih partisipatif, demokratis dan berkelanjutan
3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lainnya dikarenakan peneliti ini hanya menggunakan sedikit variabel yaitu dua variabel saja. Sehingga dapat memberikan yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa selain Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680>
- Andika, I. B. A. Y., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 340-350.
- Djollong, A. F. (2014). Teknik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif (Technique of Quantitative Research). *Istiqra'*, 2(1), 86–100.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Fathurrahman, A., & Samanto, H. (2022). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatannya teknologi informasi pengelolaan dana desa akuntabilitas di kabupaten klaten. 2022, 1143–1151.
- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2019). Pengaruh Transparansi,

- Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1).
- Liana, S. A., & Nugroho, W. S. (2022). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Kaliangkrik). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 633–647.
- Marlon Reu, F., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59>
- Mentari Tumbel, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Merawati, L. K., Hariani, N. K., & Yulastuti, I. A. N. (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 78–99. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1765>
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Murnisari, R. (2019). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 4(1), 104–121.
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- Rusni. (2021). Analisis partisipasi masyarakat terhadap penerapan good governance di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. 1–13. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/5hjqc>
- Samosir, L. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Distrik Nabire. *Jurnal Sketsa*, 15(1), 1–13.
- Sanaky, M. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah. *Jurnal Simetrik*, 11(1), 432–439. <https://doi.org/10.31959/js.v11i1.615>
- Shintarani Intan Sundari, Devi Astriani, & Fista Apriani Sujaya. (2024). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2726–2742. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1378>

Wahyuning, E., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>